

SIARAN PERS

Safer Internet Lab (Inisiatif kolaborasi antara CSIS dan Google Indonesia)

Siaran Pers 1

CSIS: Gangguan Informasi dalam Pemilu 2024 Masih Tinggi dan Mengkhawatirkan

Jakarta, 19 Oktober 2023

Safer Internet Lab, suatu inisiatif kolaborasi antara CSIS dan Google Indonesia merilis hasil survei opini publik secara nasional yang berjudul “Proyeksi dan Mitigasi Gangguan Informasi Pemilu 2024”. Rilis dan diskusi hasil survei tersebut dilaksanakan pada Rabu, 18 Oktober 2023.

Survei dilakukan secara nasional di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dengan jumlah sampel sebesar 1.320 responden yang tersebar secara proporsional. Menggunakan sampel sebesar 1.320, *margin of error* survei ini sebesar +/- 2,7 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Waktu pengumpulan data dilakukan pada tanggal 4-10 September 2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *multistage random sampling* dan responden terpilih di wawancara secara tatap muka (*informasi lebih lanjut tentang metodologi dapat melihat laporan survei melalui tautan*).

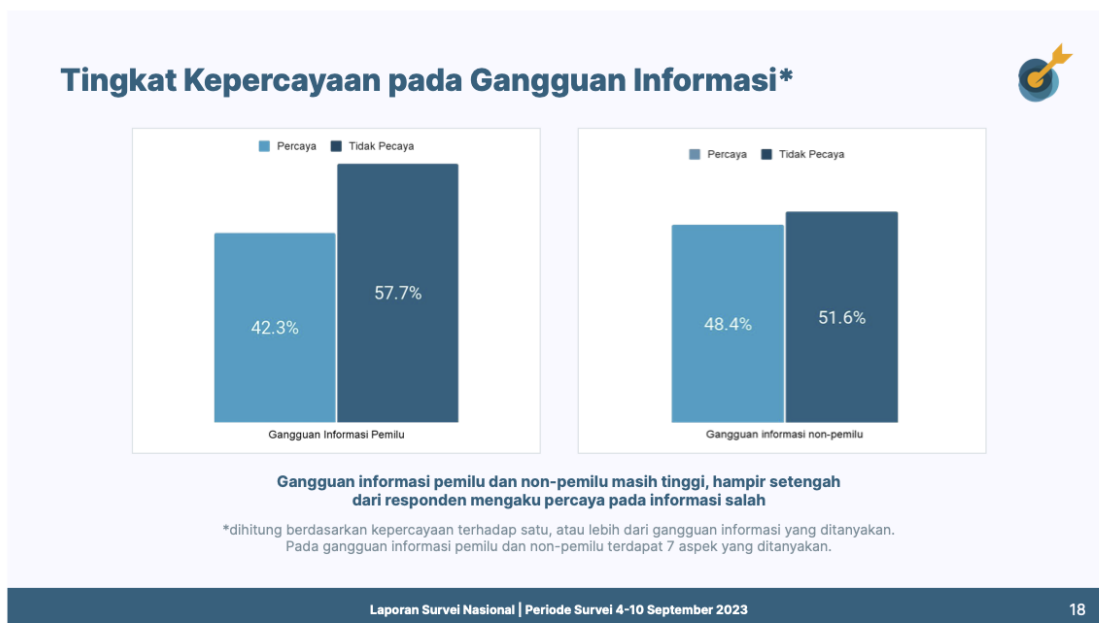
Dalam survei ini kami mendefinisikan **gangguan informasi** sebagai fenomena penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, yang dapat menimbulkan dampak merugikan. Gangguan informasi mencakup misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

- Misinformasi adalah informasi yang salah atau menyesatkan tetapi disebarakan tanpa ada niat untuk menyebabkan bahaya. Misinformasi sering kali disebarakan oleh orang-orang yang tidak menyadari bahwa informasinya salah atau keliru.
- Disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja disebarakan untuk menimbulkan bahaya atau kerugian. Disinformasi biasanya dimotivasi oleh keuntungan finansial, pengaruh politik, atau niat jahat.
- Malinformasi adalah informasi asli yang disebarakan dengan maksud untuk menimbulkan bahaya atau kerugian. Malinformasi bisa berupa bocoran informasi rahasia dengan tujuan merusak reputasi seseorang.

Dalam survei ini kami fokus untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap gangguan informasi dengan menguji level kepercayaan publik terhadap isu-isu salah yang sudah terverifikasi oleh lembaga pengecekan fakta.

Survei ini menemukan masih tingginya potensi penyebaran gangguan informasi menjelang pemilu 2024. Sebesar 42,3 persen responden mengaku percaya pada gangguan informasi pemilu dan 48,4 persen responden percaya pada gangguan informasi non-pemilu (lihat gambar 1).

Gambar 1. Tingkat Kepercayaan pada Gangguan Informasi



Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan penyebaran gangguan informasi menjelang pemilu 2024 cukup mengkhawatirkan, karena hampir setengah dari populasi percaya pada gangguan informasi dan hal tersebut akan berdampak secara buruk pada pelaksanaan pemilu 2024 dan kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara pemilu.

“Survei ini menemukan bahwa dampak negatif dari tingginya gangguan informasi sangat besar pada demokrasi dan proses pemilu dan hal tersebut akan berpeluang menurunkan kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Situasinya bisa memburuk nantinya bila terjadi perselisihan hasil pemilu dan penyebaran gangguan informasi berpotensi meningkat menjelang dimulainya kampanye,” kata Arya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria yang hadir memberikan sambutan mengatakan penyebaran gangguan informasi tidak hanya khas Indonesia, tetapi juga terjadi di sejumlah negara yang melaksanakan pemilu. Kominfo menurut Nezar saat ini mengkampanyekan pentingnya pelaksanaan pemilu damai.

“Belajar dari Pemilu sebelumnya, politik identitas dalam Pemilu 2019 cukup meresahkan masyarakat karena banyak ujaran kebencian dan bahkan pertengkaran yang tak kunjung usai ketika pemilu telah selesai. Untuk mengantisipasi gangguan informasi, Kominfo mengapresiasi sebesar-besarnya inisiatif SAIL dan CSIS untuk menciptakan dunia internet yang sehat. Pemilu yang damai diharapkan dapat menyentuh rasa kepedulian generasi muda terhadap masa depan melalui isu-isu strategis yang sesuai dengan minat mereka,” kata Nezar dalam sambutannya.

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menekankan pentingnya peran internet untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, menurut Yose, CSIS memiliki perhatian untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang sisi positif dan negatif dari internet dan digitalisasi dalam program-program riset CSIS.

Anita Ashvini Wahid, Dewan Penasehat Public Virtue Research Institute menggarisbawahi potensi penyebaran gangguan informasi yang tinggi karena adanya evolusi aktor dan medium yang berperan penting dalam menyebarkan informasi. Sementara kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi gangguan informasi masih rendah.

“Saat ini gangguan informasi menyebar melalui video-video yang dipotong kemudian dimasukkan dengan narasi-narasi yang menyimpang sehingga tidak memasukkan keseluruhan konteks yang dibicarakan di video tersebut,” ujarnya.

Hasil survei dapat diunduh melalui tautan berikut ini: <https://sail.ink/surveinasional>. Siaran ulang dari acara tersebut dapat diakses di kanal YouTube Safer Internet Lab dan CSIS Indonesia: <https://www.youtube.com/watch?v=LzQ0t22IHU>

Siaran Pers 2

CSIS: Kerentanan Masyarakat untuk Mengonsumsi Berita Salah Masih Tinggi

Jakarta, 19 Oktober 2023

Safer Internet Lab, suatu inisiatif kolaborasi antara CSIS dan Google Indonesia merilis hasil survei opini publik secara nasional yang berjudul “Proyeksi dan Mitigasi Gangguan Informasi Pemilu 2024”. Rilis dan diskusi hasil survei tersebut dilaksanakan pada Rabu, 18 Oktober 2023.

Survei dilakukan secara nasional di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dengan jumlah sampel sebesar 1.320 responden yang tersebar secara proporsional. Menggunakan sampel sebesar 1.320, *margin of error* survei ini sebesar +/- 2,7 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Waktu pengumpulan data dilakukan pada tanggal 4-10 September 2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *multistage random sampling* dan responden terpilih di wawancara secara tatap muka (*informasi lebih lanjut tentang metodologi dapat melihat laporan survei melalui tautan*).

Dalam survei ini kami mendefinisikan **gangguan informasi** sebagai fenomena penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, yang dapat menimbulkan dampak merugikan. Gangguan informasi mencakup misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

- **Misinformasi** adalah informasi yang salah atau menyesatkan tetapi disebarakan tanpa ada niat untuk menyebabkan bahaya. Misinformasi sering kali disebarakan oleh orang-orang yang tidak menyadari bahwa informasinya salah atau keliru.
- **Disinformasi** adalah informasi palsu yang sengaja disebarakan untuk menimbulkan bahaya atau kerugian. Disinformasi biasanya dimotivasi oleh keuntungan finansial, pengaruh politik, atau niat jahat.
- **Malinformasi** adalah informasi asli yang disebarakan dengan maksud untuk menimbulkan bahaya atau kerugian. Malinformasi bisa berupa bocoran informasi rahasia dengan tujuan merusak reputasi seseorang.

Secara umum survei menemukan masih tingginya kerentanan publik untuk terpapar pada gangguan informasi. Hal tersebut terjadi karena empat hal, diantaranya: (1) kesadaran publik untuk mengecek kembali kebenaran informasi masih rendah sehingga berisiko meningkatkan seseorang terpapar gangguan informasi; (2) akses publik terhadap situs pemeriksa fakta masih harus ditingkatkan; (3) rendahnya pengetahuan publik bahwa gangguan informasi disebarkan secara terorganisir; dan (4) peningkatan akses publik terhadap program literasi informasi. *(untuk selengkapnya dapat melihat hasil survei pada tautan yang telah dilampirkan di siaran pers ini).*

Survei juga menemukan bahwa masih rendahnya kebiasaan publik dalam memverifikasi informasi dan jarang mengakses hasil verifikasi lembaga pemeriksaan fakta. Selain itu, sebagian besar dari masyarakat tidak menyadari bahwa gangguan informasi kebanyakan merupakan gerakan terorganisir.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes mengatakan kerentanan publik yang tinggi untuk terpapar gangguan informasi adalah persoalan yang perlu ditangani secara bersama ke depan. Perlu kerja kolaboratif di antara pemerintah, penyedia platform teknologi, dan masyarakat sipil.

“Penyebaran gangguan informasi dilakukan secara terencana, terorganisir dan sistematis. Untuk membendung laju penyebarannya, kerja sama multi-pihak dalam tata kelola internet ke depan perlu dilakukan secara bersama, di antara pemerintah, penyedia platform teknologi, dan masyarakat sipil,” kata Arya.

Beltsazar Krisetya, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS yang hadir dalam rilis tersebut menggambarkan pesatnya penyebaran gangguan informasi seperti tingginya paparan polusi udara di perkotaan yang dapat menginfeksi publik dengan latar belakang sosio-demografis apa pun.

“Orang yang hidup di ekosistem dengan informasi yang berlimpah juga lebih mudah terpapar gangguan informasi. Namun, cara untuk memitigasi pencemaran ekosistem tersebut bukanlah dengan membatasi “udara”nya, yakni kebebasan berekspresi, tetapi dengan mencegah sumber yang sengaja menciptakan dan menyebarkan gangguan informasi serta memberikan pendidikan dan literasi digital yang lebih efektif,” tutur Beltsazar.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel A. Pangerapan yang hadir sebagai panelis mengatakan pentingnya kecepatan lembaga verifikasi fakta dalam memverifikasi informasi agar dapat melawan gangguan informasi yang juga tersebar dengan cepat.

Sementara Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia Putri Alam menekankan bahwa untuk mengurangi penyebaran gangguan informasi, pentingnya meningkatkan akses publik terhadap medium pengecekan fakta dan juga meningkatkan efektivitas program literasi digital.

Direktur Informasi Media Digital (Tempo Digital) Wahyu Dhyatmika menyampaikan pentingnya upaya *pre-bunking* atau upaya pencegahan dengan cara menyiapkan publik dengan keahlian mencerna gangguan informasi secara kritis sebagai bentuk pertahanan utama.

August Mellaz, Anggota KPU RI menyuarakan kekhawatirannya atas gangguan informasi sebagai fenomena yang sistemik dan terolah. Sementara, tenaga ahli Bawaslu RI, Ronald M. Manoach, menekankan bahwa gangguan informasi pemilu tidak hanya hidup di masa pemilu saja, tetapi bisa masih bertahan setelah selesainya pemilu dan dalam waktu yang panjang.

Hasil survei dapat diunduh melalui tautan berikut ini: <https://sail.ink/surveinasional>. Siaran ulang dari acara tersebut dapat di akses di kanal YouTube Safer Internet Lab dan CSIS Indonesia: <https://www.youtube.com/watch?v=LzQ0t22IHU>